LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) & SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA KELAS/TYPE A PERIODE BULAN JULI-SEPTEMBER 2025

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014



PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA (KELAS/TYPE A)

YOGYAKARTA, OKTOBER 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) & SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi) Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) & SP3K (Survei Pelayanan Publik & Persepsi Korupsi) yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan baik pelayanan publik secara maupun tingkat persepsi korupsi bisa dijelaskan/diukur umum pelayanan yang membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang diambil melalui aplikasi kuesioner online.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Oktober 2025

ogyakarta

20087110870

DAFTAR ISI

	Н	alaman
нагама	N JUDUL	i
	NGANTAR	ii
	ISI	iii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan dan Sasaran	2
	C. Rencana Kerja Pelaksanaan	2
	D. Tahapan Pelaksanaan	3
BAB II.	METODOLOGI PENELITIAN	4
	A. Metode Survei	4
	B. Teknik Pengumpulan Data	4
	C. Variabel Pengukuran SKM	4
	D. Teknik Analisis Data	5
BAB III.	JUMLAH RESPONDEN	7
	A. Jumlah Responden Survey Kepuasan Masyarakat	7
	A. Jumlah Responden Survey Kepuasan MasyarakatB. Jumlah Responden Survey Pelayanan Publik & Persepsi Korups	•
BAB IV.	HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN SURVEY PERSEPS ANTI KORUPSI	SI 15
	A. Persyaratan	17
	B. Prosedur	
	C. Waktu Pelayanan	18
	D. Biaya/Tarif	19
	E. Kesesuaian Produk Jenis Pelayanan	19
	F. Kompetensi Pelaksana	20
	G. Perilaku Pelaksana	21
	H. Kualitas Sarana dan Prasarana	22
	I. Penanganan Pengaduan	22
	J. Tidak Ada Diskriminasi	23
	K. Tidak Ada Pelayanan diluar Prosedur/Kecurangan	24
	L. Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas	25
	M. Tidak Ada Pungutan Liar	26
	N. Tidak Ada Percaloan/Perantara	27
BAB V.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	29
	A. Kesimpulan	29
	B Rekomendasi	31

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik nonprofit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa yang memiliki karakteristik barang publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan publik cenderung bersifat monopoli dan bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan persaingan. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas layanan. Keadaan ini didukung oleh barang yang memiliki karakteristik *public goods*, dimana barang yang disediakan pemerintah pada umumnya merupakan barang yang dikonsumsi masyarakat banyak dan tingkat keterhabisannya cenderung rendah, sehingga perlu pengaturan dalam pemenuhan kebutuhan barang dengan keberadaan pemerintah menjamin pemerataan pemenuhan kebutuhan public goods tersebut.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melaksanakan survei IKM (Indeks Kepuasaan Masyarakat) dan SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi) dalam rangka pelaksaaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan II-11 Yogyakarta. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- 2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- 3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

C. Rencana Kerja Pelaksanaan

Pengukuran/survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi) di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ini dilaksanakan pada bulan Juli s/d September 2025.

D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, antara lain :

- 1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling* yang diisi pengunjung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui Aplikasi E-Survey.
- Tim survei membuat instrumen berupa angket/kuesioner, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 3. Tim survei melakukan survei setiap hari terhadap keseluruhan pengunjung.
- 4. Kuesioner yang telah diisi melalui Aplikasi E-Survey dicetak dan diserahkan kepada tim survei.
- 5. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif yang telah tersusun secara otomatis dan sistematis melalui Aplikasi E-Survey.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survei

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, antara lain Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, Lanud Adi Sucipto, Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, Korem 072/Pamungkas, dan *stakeholders* di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, mahasiswa magang maupun para pengunjung sidang. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik *simple random sampling*.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner yang diisi melalui Aplikasi E-Survey dengan jawaban terbuka. Kuesioner atau angket penelitian ini, terlampir.

C. Variabel Pengukuran SKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 anatara lain sebagai berikut:

❖ Tentang Pedoman Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Kecepatan Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Kesesuaian Produk Pelayanan

Kesesuaian produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Kualitas sarana dan prasarana

Kualitas sarana dan prasarana adalah sarana dan prasarana yang ada telah mendukung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

9. Penanganan Pengaduan.

Penanganan pengaduan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

❖ Tentang Pedoman SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi) yang terdiri dari 5 ruang lingkup, antara lain:

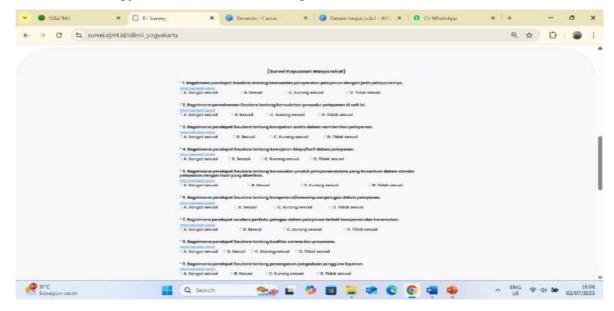
- 1. Tidak ada diskriminasi.
- 2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan.
- 3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas.
- 4. Tidak ada pungutan liar.
- 5. Tidak ada percaloan/perantara.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran survey indek kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ini digunakan analisis statistik deskriptif.

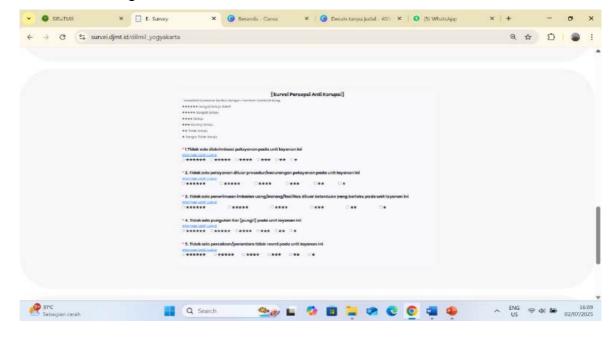
Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat *option* jawaban. Adapun pensekorannya

menggunakan skala likert, dengan skor A sampai dengan D. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ditentukan sebagai berikut :



Sedangkan analisis data pada pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Lima ruang lingkup tersebut, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 5 item, dengan lima *option* jawaban. Adapun pensekorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 6. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ditentukan sebagai berikut :

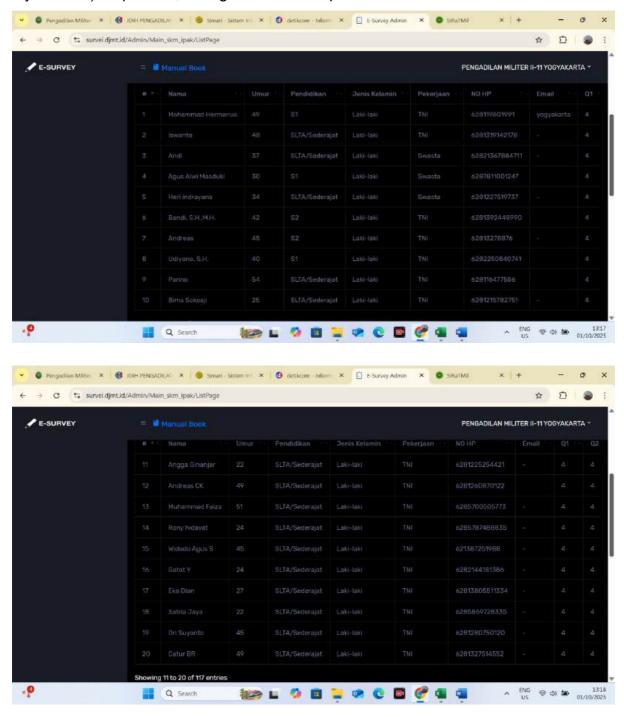


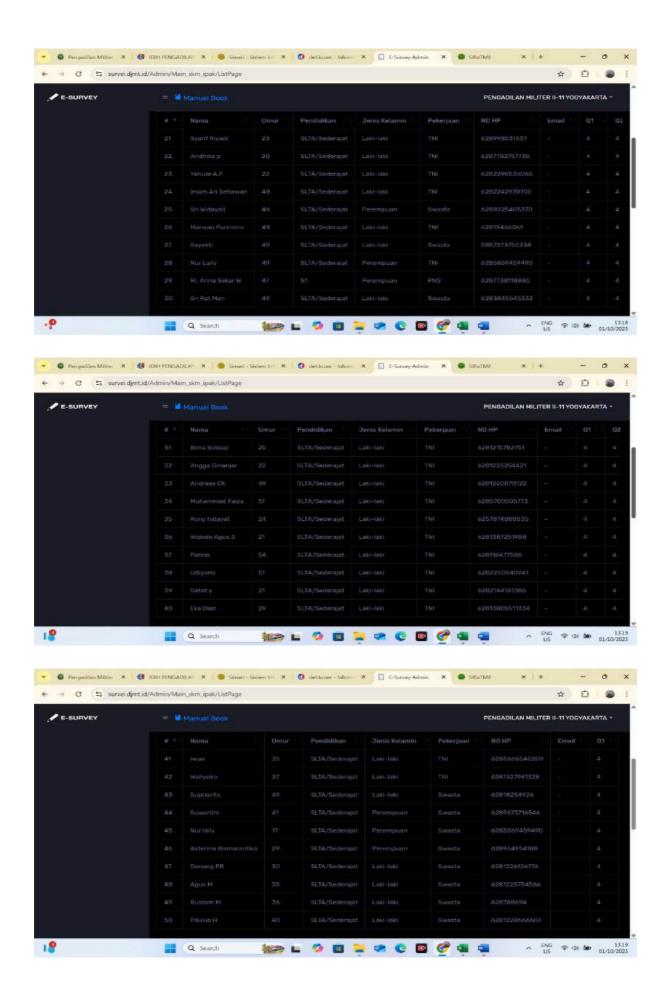
BAB III JUMLAH RESPONDEN

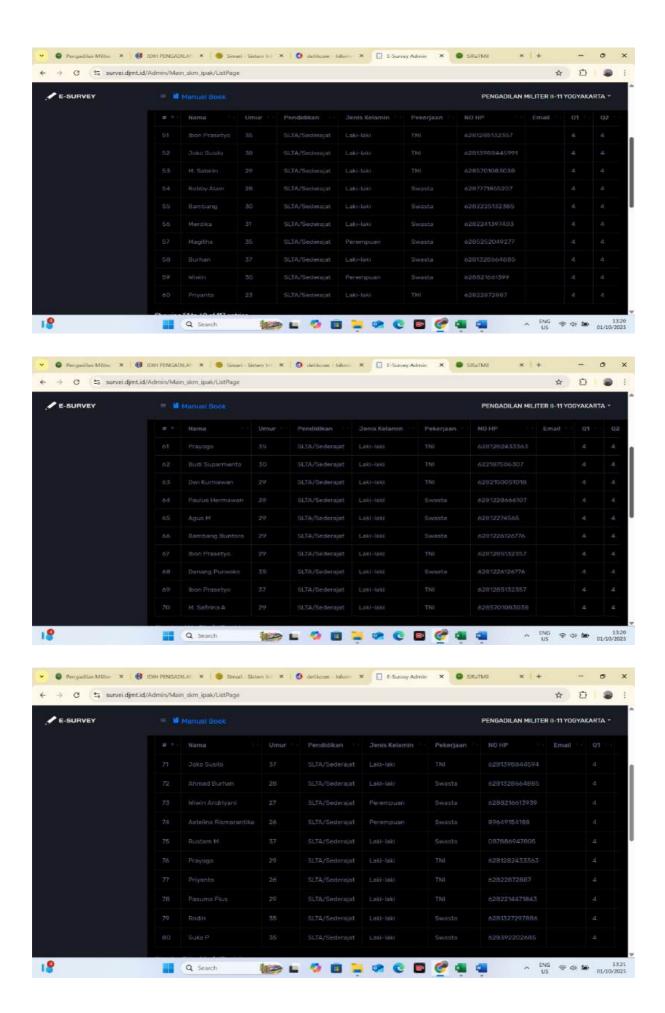
Profil Responden kali ini, kami ambil sampel dari Aplikasi Online E Survey antara tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan 30 September 2025

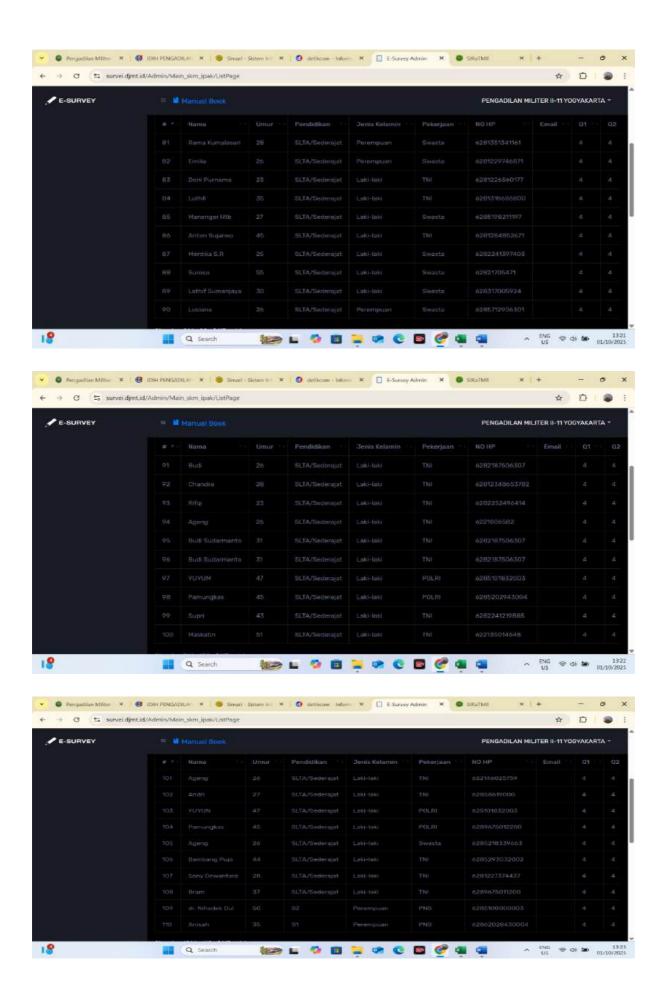
A. Responden survey kepuasan masyarakat

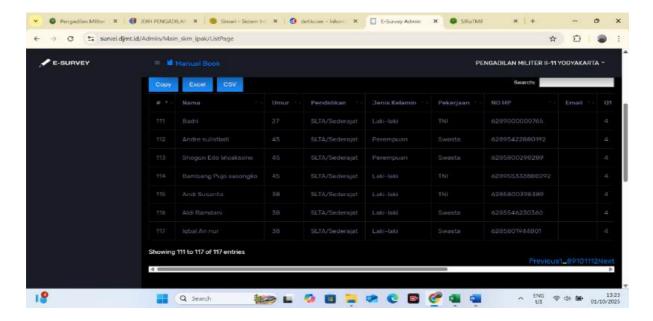
Jumlah responden untuk survey kepuasan masyarakat adalah sebanyak 117 (seratus tujuh belas) responden, sebagaimana terlampir dibawah ini :





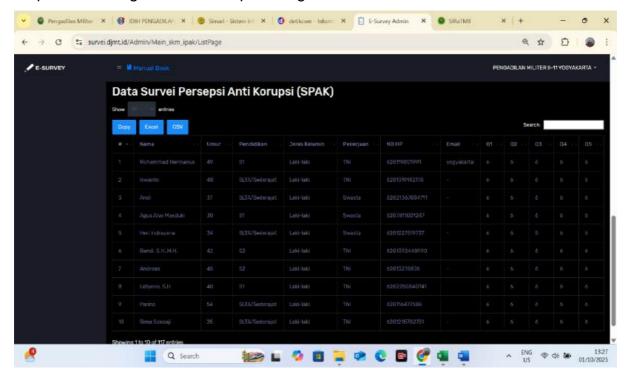


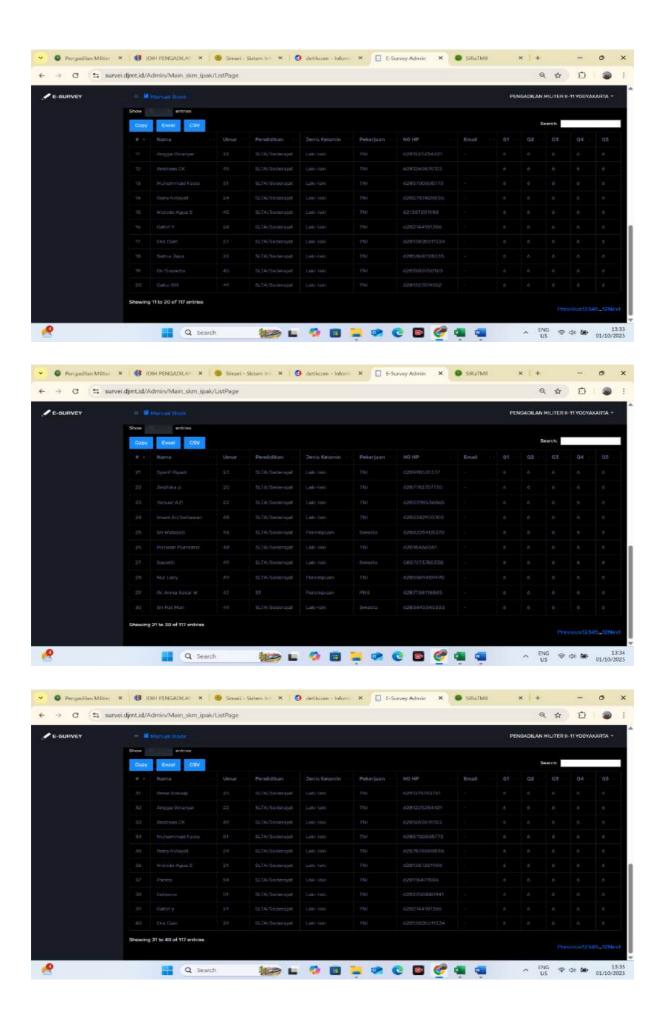


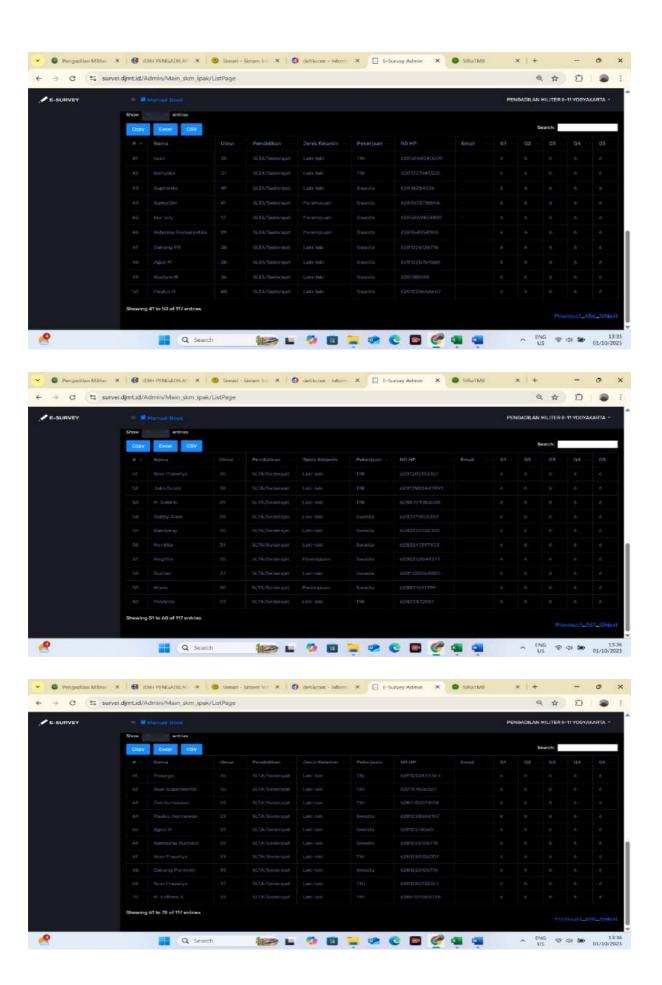


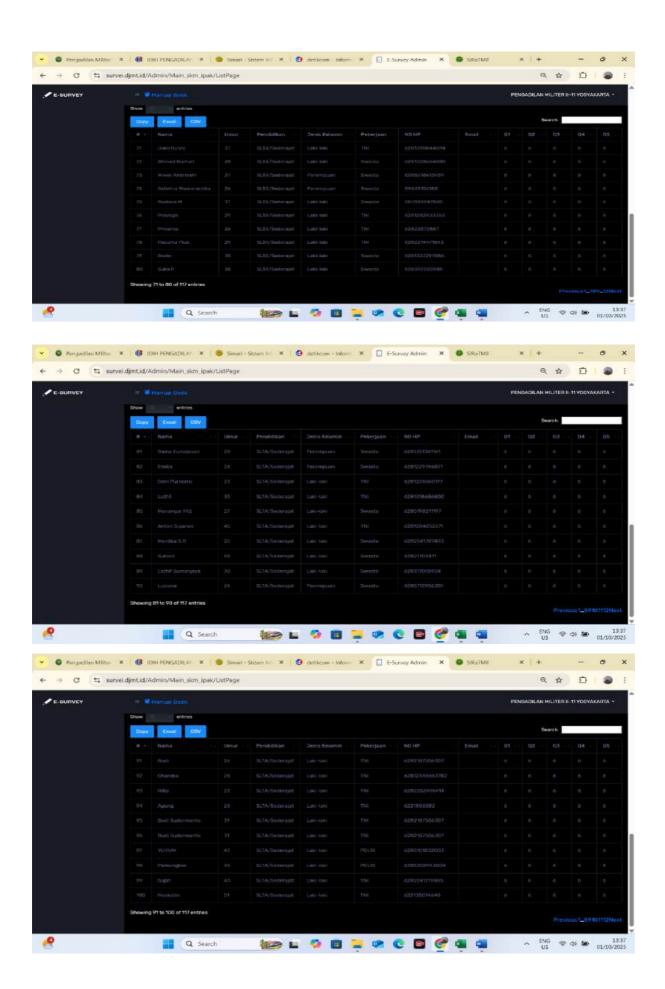
B. Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

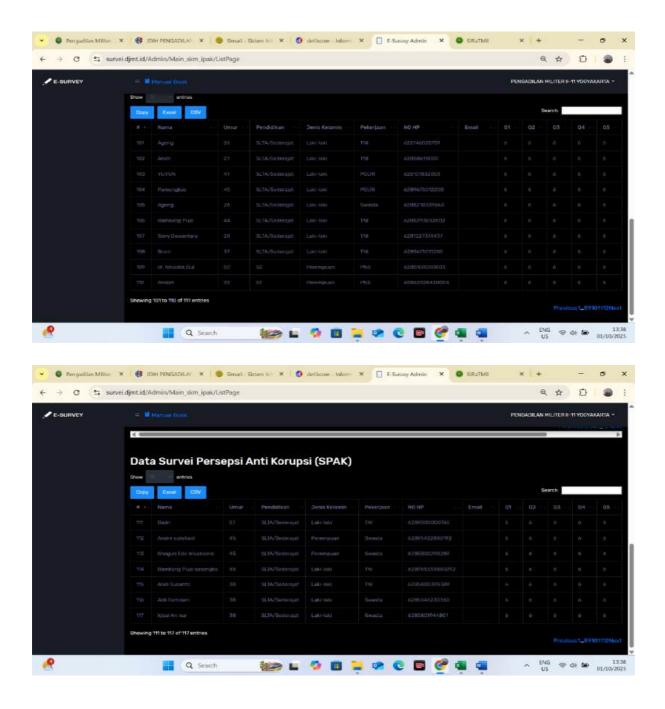
Jumlah responden untuk Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah sebanyak 246 responden sebagaimana terlampir sebagai berikut :











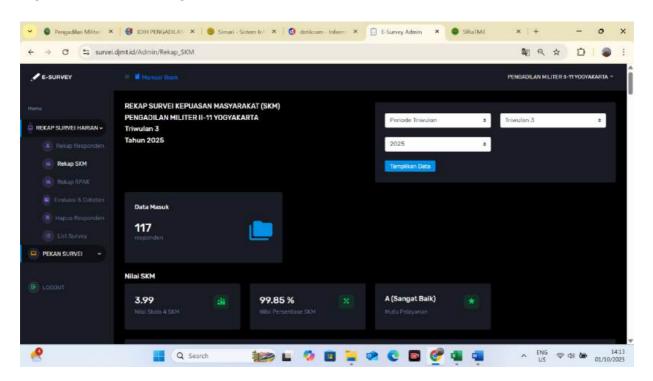
BAB IV

HASIL SURVEI INDEK KEPUASAN MASYARAKAT DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

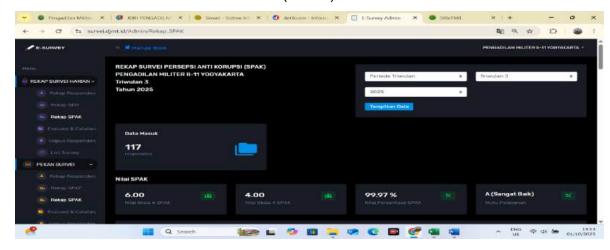
Kuesioner yang telah di isi dan terdata secara online terkumpul dan terisi dengan lengkap pada Aplikasi Survey Online sejumlah 117 (seratus tujuh belas) responden. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Aplikasi E-Survey pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebesar 99,85 berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval A). Sedangkan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) melalui Aplikasi E-Survey sebesar 99,97 berada pada kategori "SANGAT BAIK".

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari 9 (Sembilan) ruang lingkup & SPAK terdiri atas 5 (lima) ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

SURVEY INDEK KEPUASAN MASYARAKAT



SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)



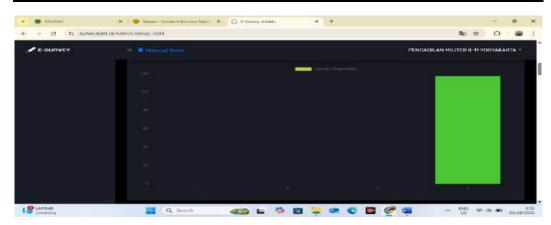
A. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori "sangat baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Ruang Lingkup: Persyaratan

No.	Iawahan	Skor Frekuensi	uensi	
INO.	Jawaban	SKUI	F	%
1.	Sangat Sesuai	4	117	100,00
2.	Sesuai	3	0	0,0
3.	Kurang Sesuai	2	0	0,0
4.	Tidak Sesuai	1	0	0,0
		Jumlah	117	100,0



B. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 4 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori "sangat baik".

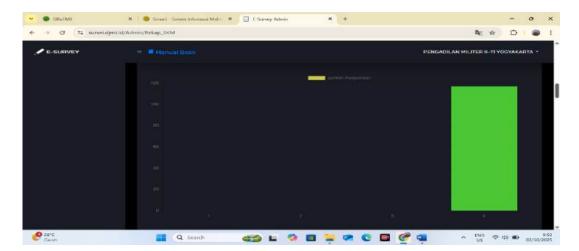
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Frekuensi No. Skor Jawaban F % Sangat Sesuai 4 117 100,00 1. 2. Sesuai 3 0 0,0 3. Kurang Sesuai 2 0 0,0 Tidak Sesuai 0,0 4.

Jumlah

117

Tabel 2 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Ruang Lingkup: Prosedur



C. Kecepatan Waktu Pelayanan

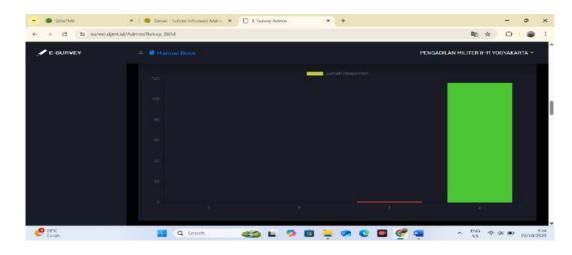
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.99 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori "sangat baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

100,0

Tabel 3 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Ruang Lingkup: Kecepatan Waktu Pelayanan

No.	Jarrahan	Clron	Frekuensi	
NO.	Jawaban	Skor	F	%
1.	Sangat Sesuai	4	116	99,15
2.	Sesuai	3	1	0,85
3.	Kurang Sesuai	2	0	0,0
4.	Tidak Sesuai	1	0	0,0
	Jumlah		117	100,0



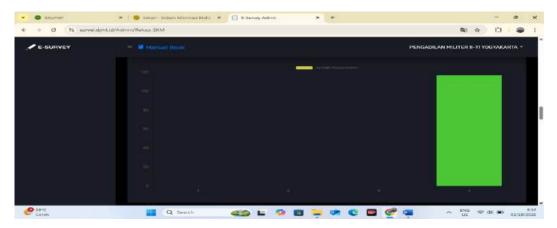
D. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "Sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori "sangat baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

No.	Jawaban	Skor	Frek	uensi
NO.	jawabali	SKUI	F	%
1.	Sangat Sesuai	4	117	100,0
2.	Sesuai	3	0	0,0
3.	Kurang Sesuai	2	0	0,0
4.	Tidak Sesuai	1	0	,0
		117	100,0	



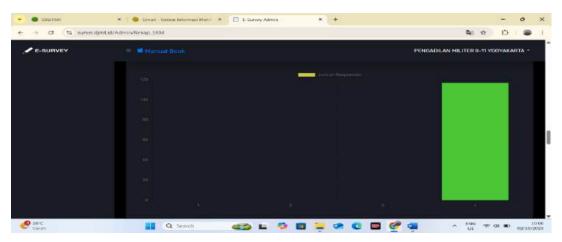
E. Kesesuaian Produk Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori "sangat baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Ruang Lingkup: Kesesuaian Produk Jenis Pelayanan

No	Javrahan	Clron	117 100,0 0 0,0	
No.	Jawaban	Skor	F	%
1.	Sangat Sesuai	4	117	100,0
2.	Sesuai	3	0	0,0
3.	Kurang Sesuai	2	0	0,0
4.	Tidak Sesuai	1	0	0,0
	Jumlah		117	100,0



Page 20 of 31

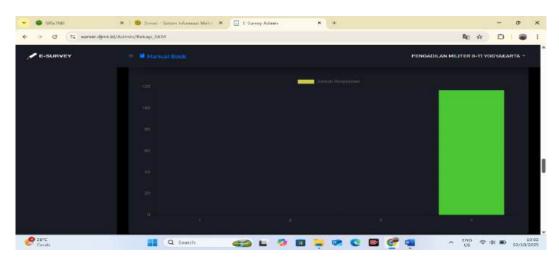
F. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori "sangat baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

Ma	Iourahan	Clron	Frek	uensi
No.	Jawaban	Skor	F	%
1.	Sangat Sesuai	4	117	100,0
2.	Sesuai	3	0	0,0
3.	Kurang Sesuai	2	0	0,0
4.	Tidak Sesuai	1	0	0,0
		Jumlah	117	100,0



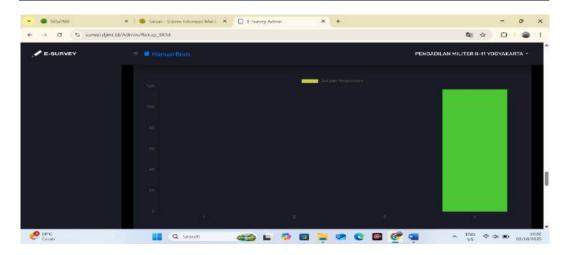
G. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori 'sangat baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

No.	Jarrahan	3 0 0,0	uensi	
NO.	Jawaban	SKOF	F	%
1.	Sangat Sesuai	4	117	100,0
2.	Sesuai	3	0	0,0
3.	Kurang Sesuai	2	0	0,0
4.	Tidak Sesuai	1	0	0,0
		Jumlah	117	100,0



H. Kualitas Sarana dan Prasarana

Kualitas sarana dan prasarana adalah merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.99 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kualitas sarana dan prasarana berada pada kategori "sangat baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Ruang Lingkup: Kualitas sarana dan prasarana

No	Jarrahan	Clron	Frek	uensi
No.	Jawaban	Skor	F	%
1.	Sangat Sesuai	4	116	99,15
2.	Sesuai	3	1	0,85

3.	Kurang Sesuai	2	0	0,0
4.	Tidak Sesuai	1	0	0,0
		Jumlah	117	100,0



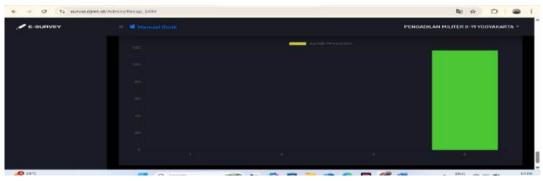
I. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 4.00 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori "sangat baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan

No.	Inurahan	Skor	Frek	uensi
INO.	Jawaban	SKUI	F	%
1.	Sangat Sesuai	4	117	100,0
2.	Sesuai	3	0	0,0
3.	Kurang Sesuai	2	0	0,0
4.	Tidak Sesuai	1	0	0,0
		Jumlah	117	100,0



Page 23 of 31

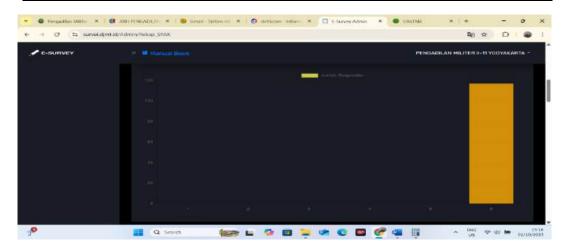
J. Tidak ada Diskriminasi

Tidak ada diskriminatif adalah tata cara memberikan pelayanan tidak membeda-bedakan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup tidak ada diskriminasi berada pada kategori "sangat baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup tidak ada diskriminasi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Ruang Lingkup: Tidak ada diskriminasi

No.	Jawaban	5 0 0 4 0 0	ruensi	
NO.	Jawabali	SKOI	F	%
1.	Sangat Setuju Sekali	6	117	100,0
2.	Sangat setuju	5	0	0,0
3.	Setuju	4	0	0,0
4.	Kurang Setuju	3	0	0,0
5.	Tidak Setuju	2	0	0,0
6.	Sangat Tidak setuju	1	0	0,0
		Jumlah	117	100,0



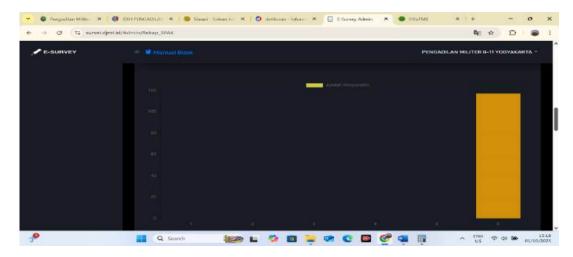
K. Tidak ada pelayanan diluar Prosedur/Kecurangan

Tidak ada Pelayanan diluar Prosedur/Kecurangan adalah bahwa dalam memberikan pelayanan tidak terdapat kecurangan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan berada pada kategori "sangat baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Ruang Lingkup: Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan

No	Jarrahan	Skor	Frekuensi F % 117 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0	
No.	Jawaban	SKOI	F	%
1.	Sangat Setuju Sekali	6	117	100,0
2.	Sangat setuju	5	0	0,0
3.	Setuju	4	0	0,0
4.	Kurang Setuju	3	0	0,0
5.	Tidak Setuju	2	0	0,0
6.	Sangat Tidak setuju	1	0	0,0
		Jumlah	117	100,0



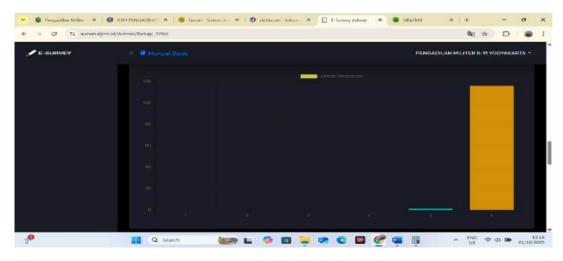
L. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas

Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas adalah bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,99 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas berada pada kategori "sangat baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 12 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Ruang Lingkup: Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Setuju Sekali	6	116	99,15
2.	Sangat setuju	5	1	0,85
3.	Setuju	4	0	0,0
4.	Kurang Setuju	3	0	0,0
5.	Tidak Setuju	2	0	0,0
6.	Sangat Tidak setuju	1	0	0,0
			117	100,0



M. Tidak Ada Pungutan Liar

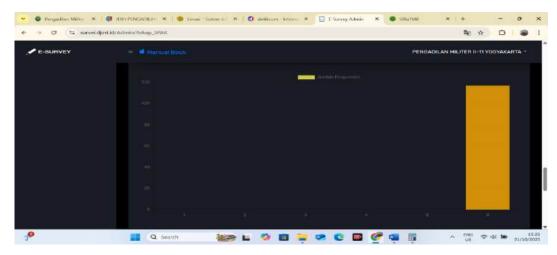
Tidak ada pungutan liar adalah tata cara memberikan pelayanan tidak terdapat pungutan dalam bentuk apaun. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Tidak ada pungutan liar berada pada kategori "sangat baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Tidak ada pungutan liar disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Ruang Lingkup: Tidak ada pungutan liar

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Setuju Sekali	6	117	100,0
2.	Sangat setuju	5	0	0,0
3.	Setuju	4	0	0,0
4.	Kurang Setuju	3	0	0,0

5.	Tidak Setuju	2	0	0,0
6.	Sangat Tidak setuju	1	0	0,0
		Jumlah	117	100,0



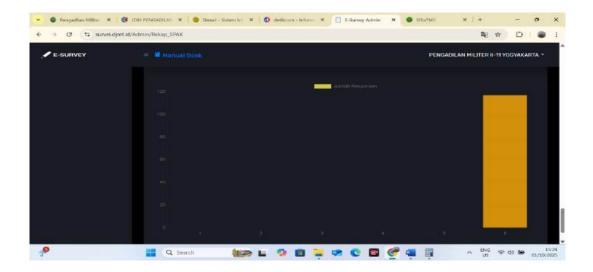
N. Tidak Ada Percaloan/Perantara

Tidak ada percaloan/perantara adalah tata cara pelaksanaan dalam memberikan pelayanan tidak terdapat percaloan atau perantara. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Tidak ada percaloan/perantara berada pada kategori "sangat baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Tidak ada percaloan/perantara disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 14 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Ruang Lingkup: Tidak ada percaloan/perantara

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Setuju Sekali	6	117	100,0
2.	Sangat setuju	5	0	0,0
3.	Setuju	4	0	0,0
4.	Kurang Setuju	3	0	0,0
5.	Tidak Setuju	2	0	0,0
6.	Sangat Tidak setuju	1	0	0,0
		Jumlah	117	100,0



Hasil Survey Kualitatif

Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis di dalam aplikasi E-Survey. Saran-saran perbaikan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang diusulkan responden, antara lain :

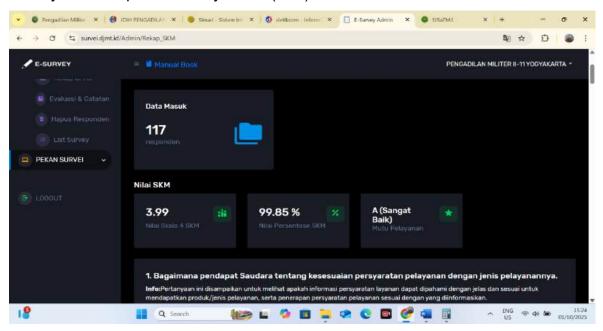
- 1. Mohon dipertahankan dan ditingkatkan lagi pelayanan yang sudah bagus menjadi lebih bagus lagi.
- 2. Agar pelayanan yang dirasa belum memuaskan lebih ditingkatkan lagi agar dapat mencapai hasil yang sangat memuaskan
- 3. Lebih ditingkatkan dalam pelayanan segala aspek, selebihnya sudah bagus dalam pelayanan.
- 4. Ramah dalam pelayanan di masyarakat, agar selalu melayani aturan yang berlaku, Pertahankan apa yang sudah ada dan bagus
- 5. Meningkatkan kemampuan melayani masyarakat, tepat waktu dalam melayani
- 6. Pelayanan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar selalu tepat waktu dalam melayani masyarakat, kinerja karyawan/ti harus lebih ditingkatkan lagi
- 7. Tidak boleh cepat berpuas diri

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang melalui Aplikasi E-Survey sebesar 99.78 berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval A). Sedangkan Survey Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi melalui Aplikasi Online SPAK sebesar 99,85 berada pada kategori "SANGAT BAIK". Adapun kesimpulan pada masingmasing ruang lingkup sebagai berikut:

Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)



Mutu pelayanan menurut masyarakat pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, mempunyai penilaian "SANGAT BAIK".

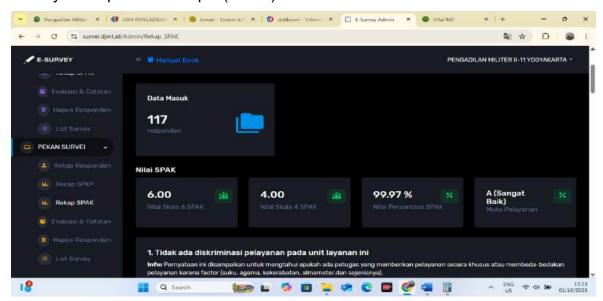
Bahwa kesimpulan dari 9 (sembilan) Ruang Lingkup SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) adalah sebagai berikut:

- Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan nilai 4,00 pada kategori "SANGAT BAIK"
- 2. Kemudahan Prosedur Pelayanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan nilai 4,00 pada kategori "SANGAT BAIK"
- 3. Kecepatan Waktu pelayanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan nilai

- 3,99 pada kategori "SANGAT BAIK"
- 4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan nilai 4,00 pada kategori "SANGAT BAIK"
- Kesesuaian Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Militer II-11
 Yogyakarta dengan nilai 4,00 pada kategori "SANGAT BAIK"
- 6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan nilai 4,00 pada kategori "SANGAT BAIK"
- 7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan nilai 4,00 pada kategori "SANGAT BAIK"
- Kualiatas sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan Pelayanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan nilai 3,99 pada kategori "SANGAT BAIK"
- 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan nilai 4,00 pada kategori "SANGAT BAIK"

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup "Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan." disusul ruang lingkup "Biaya/tarif", dan "Kompetensi Petugas".

Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)



Mutu pelayanan menurut masyarakat pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, mempunyai penilaian "SANGAT BAIK".

Bahwa kesimpulan dari 5 (lima) Ruang Lingkup SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi) adalah sebagai berikut :

- 1. Tidak ada diskriminasi, dengan nilai 4,00 pada kategori "SANGAT BAIK".
- 2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan, dengan nilai 4,00 pada kategori "SANGAT BAIK".
- 3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas, dengan nilai 3,99 pada kategori "SANGAT BAIK".
- 4. Tidak ada pungutan liar, dengan nilai 4,00 pada kategori "SANGAT BAIK".
- 5. Tidak ada percaloan/perantara, dengan nilai 4,00 pada kategori "SANGAT BAIK".

B. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Kelas/type A hendaknya tetap mempertahankan ataupun kalau bisa lebih meningkatkan pelayanannya khususnya pada keseluruhan ruang lingkup baik dari survey kepuasan masyarakat maupun survey pelayanan publik dan persepsi korupsi, hal mana semua ruang lingkup survey tersebut berada pada kategori sangat baik.

Peningkatan pelayanan yang cepat, tepat dan berintegritas dijadikan sebagai prioritas dalam memberikan kepuasan kepada para pencari keadilan dan masyarakat pengguna layanan pengadilan pada kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

3 Oktober 2025

ua Survei,

hk NRF 2920087110870